

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk memilah dan memilih alternatif-alternatif pilihan, kemudian menentukan alternatif mana yang paling tepat dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait lainnya dalam merumuskan arah kebijakan, strategi dan prioritas program dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan (Dadang Solihin, 2005).

Pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang sistematis dan akurat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah serta dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Perencanaan yang sistematis akan

sangat membantu dalam proses kontrol, membantu mengantisipasi masalah sehingga jika ditemukan ketidaksesuaian bisa segera dilakukan evaluasi dengan baik, cepat dan jelas.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memerlukan suatu penyusunan perencanaan terlebih dahulu melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Dalam lingkup perangkat daerah, dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program Kepala daerah yaitu Rencana Strategis (Rensta) yang merupakan penjabaran konkrit dan bersifat operasional dari RPJMD sesuai dengan Tupoksi perangkat daerah yang bersangkutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Agar penyusunan rencana strategis termasuk perumusan program dan kegiatan di dalamnya terukur dengan sasaran yang jelas dan konkrit. Maka diperlukan dokumen perencanaan tahunan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan melakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah setiap tahunnya berupa Rencana Kerja perangkat daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) sehingga penyusunannya berpedoman pada Renstra SKPD serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang berfungsi menjabarkan, menerjemahkan serta mengoperasionalkan Renstra DPMPTSP 2018-2023 serta RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ke dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun ke depan yang memuat potensi, peluang dan kendala yang ada dengan tetap memperhatikan keterpaduan dan keterkaitan antara perencanaan, penetapan program dan penganggaran dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
- 18) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 19) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 21) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 22) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan perencanaan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Purwakarta selama satu tahun anggaran 2022 yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta sebagai bahan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini adalah untuk:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Rencana Strategis DPMPTSP;
- 2) Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 3) Menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kab. Purwakarta
	2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kab. Purwakarta
	2.3 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA
BAB V	PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPMPTSP

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020 di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta berpedoman kepada Sasaran, indikator kinerja utama (IKU), program dan kegiatan yang tercantum pada dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2016 tentang tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan tujuan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 yaitu "**Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif**". Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta didukung oleh 2 (dua) Sasaran yaitu :

#### **Sasaran Pertama,**

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN.

**Indikator** : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Dengan target kinerja pada Tahun 2022 adalah sebesar 70 Triliun.

## Sasaran Kedua,

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal.

**Indikator** : Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2022 adalah sebesar 82,45.

Pada tahun 2020 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	KET
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	60 Triliun	69,76 Triliun	Tercapai 116%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,35	85,59	Tercapai 104%

Sumber : LAKIP DPMPTSP, Tahun 2020.

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 2 indikator yang diukur pada Tahun 2020, semuanya melebihi target, Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dengan ketercapaian sebesar 116% dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan ketercapaian sebesar 104%.

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Penanaman Modal yakni Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern

melalui penerapan SPBE. Sedangkan program pembangunan yang dilaksanakan terdiri dari : Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, Program Perbaikan Iklim Investasi, Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu, dan Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian	Perangkat Daerah	Predikat Kinerja
1	Jumlah Buku Promosi Investasi	Buku	3,00	1,00	33,33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT RENDAH
2	Jumlah Keikutsertaan Pada Pameran Investasi	Event	11,00	1,00	9,09	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT RENDAH
3	Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	100,00	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT TINGGI
4	Persentase Perusahaan Yang Mendapat Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	100,00	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT TINGGI
5	Persentase Pengaduan Perizinan	Persen	100,00	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT TINGGI
6	Peningkatan Nilai IKM	Persen	80,75	85,59	105,99	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MELAMPAUI
7	Persentase Jumlah Izin Yang Dapat Diselesaikan	Persen	80,00	80,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT TINGGI
8	Persentase Kesesuaian Regulasi PTSP Pusat dan Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT TINGGI

Pencapaian terhadap target kinerja sasaran sebagaimana telah disebutkan bukan berarti tanpa hambatan, adapun permasalahan dalam penanaman modal dan perijinan yang masih terjadi dan menjadi kendala dalam peningkatan kinerja DPMPTSP tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a) Data potensi investasi yang tersedia kurang memadai.
- b) Implementasi insentif dan fasilitasi penanaman modal belum terwujud.
- c) Pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital belum maksimal.
- d) Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Kabupaten Purwakarta.
- e) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam bidang teknologi informasi dan teknis perizinan.
- f) SOP dan Standar pelayanan masih belum up to date sesuai dengan jumlah jenis layanan.
- g) Terkait dengan Tim Teknis yang mempunyai kewenangan atas penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi, prosesnya masih di masing-masing perangkat daerah dan belum di delegasikan kepada Tim Teknis yang merupakan bagian dari DPMPTSP.

Permasalahan tersebut menjadi masukan serta acuan dalam penyusunan rencana kerja di Tahun 2022 ini sehingga dapat terakomodir dalam program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan berdasarkan tingkat pencapaian Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta atas realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

## Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019		Target Capaian Kinerja Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Nilai Realisasi Kinerja	Hambatan / Permasalahan
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
2.18.0.00.0.0.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				60.509.983.836		3.790.441.312		9.585.216.000		9.061.107.154		12.851.548.466		
2.18	Penanaman Modal				60.509.983.836		3.790.441.312		9.585.216.000		9.061.107.154		12.851.548.466		
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	1.023.162.379	100,00	1.023.162.379	0,00	0			100,00	1.023.162.379	SANGAT TINGGI	
2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	524.201.180	100,00	524.201.180	0,00	0			100,00	524.201.180	SANGAT TINGGI	
2.12.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	185.430.000	100,00	185.430.000	0,00	0			100,00	185.430.000	SANGAT TINGGI	
2.12.2.12.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	56.409.200	100,00	56.409.200	0,00	0			100,00	56.409.200	SANGAT TINGGI	
2.12.2.12.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran				8.711.426.000		0		8.711.426.000		8.337.253.056		8.337.253.056		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019		Target Capaian Kinerja Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Nilai Realisasi Kinerja	Hambatan / Permasalahan
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	93,00		0,00		93		93,00		93,00		SANGAT TINGGI	
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	90,00		0,00		90,00		90,00		90,00		SANGAT TINGGI	
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	85,00		0,00		85,00		85,00		85,00		SANGAT TINGGI	
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	85,00		0,00		85,00		85,00		85,00		SANGAT TINGGI	
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	90,00		0,00		90,00		90,00		90,00		SANGAT TINGGI	
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		SANGAT TINGGI	
2.12.2.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Jumlah Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah	Set	1,00	798.129.709	1,00	798.129.709	0,00	0			1,00	798.129.709	SANGAT TINGGI	
		2 Jumlah Buku Peluang Potensi Investasi	Set	1,00		1,00		0,00				1,00		SANGAT TINGGI	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019		Target Capaian Kinerja Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Nilai Realisasi Kinerja	Hambatan / Permasalahan		
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
		3 Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri	Event	3,00		3,00		0,00					3,00			SANGAT TINGGI	
2.12.2.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasidan Realisasi Investasi				418.305.094		418.305.094			0			418.305.094				
		1 Persentase Perusahaan PMAdan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	90,00		90,00		0,00					90,00			SANGAT TINGGI	
		2 Jumlah Dokumen Data dan Laporan InvestasiYang Akurat	Jumlah	1,00		1,00		0,00					1,00			SANGAT TINGGI	
		Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen	10,16		10,16		0,00					10,16			SANGAT TINGGI	
2.12.2.12.01.18	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan				784.803.750		784.803.750			0			784.803.750				
		1 Persentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perzinan	Persen	100,00		100,00		0,00					100,00			SANGAT TINGGI	
		2 Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	80,00		80,00		0,00					80,00			SANGAT TINGGI	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019		Target Capaian Kinerja Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Nilai Realisasi Kinerja	Hambatan / Permasalahan
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		3 Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perijinan	Persen	95,00		95,00		0,00				95,00		SANGAT TINGGI	
		4 Persentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perjinan	Persen	100,00		100,00		0,00				100,00		SANGAT TINGGI	
		5 Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan Database Pelayanan Perjinan	Persen	100,00		100,00		0,00				100,00		SANGAT TINGGI	
2.12.2.12.01.19	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal				42.000.000		0		42.000.000		36.862.000		36.862.000		
		1 Jumlah Buku Promosi Investasi	Buku	3,00		0,00		3,00		1,00		1,00		SANGAT RENDAH	Refocusing Anggaran
		2 Jumlah Keikutsertaan Pada Pameran Investasi	Event	11,00		0,00		11,00		1,00		1,00		SANGAT RENDAH	Terhambatnya pelaksanaan koordinasi dan perjalanan dinas dikarenakan dalam kondisi Pandemi Covid-19
2.12.2.12.01.20	Program Perbaikan Iklim Investasi				280.000.000		0		280.000.000		218.710.300		218.710.300		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019		Target Capaian Kinerja Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Nilai Realisasi Kinerja	Hambatan / Permasalahan
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		1 Persentase Perusahaan PMAdan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		SANGAT TINGGI	
		2 Persentase Perusahaan Yang Mendapat Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		SANGAT TINGGI	
		3 Persentase Pengaduan Perizinan	Persen	100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		SANGAT TINGGI	
		4 Peningkatan Nilai IKM	Persen	80,75		0,00		80,75		85,59		85,59		MELAMPA UI	
2.12.2.12.01.21	Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu	Persentase Jumlah Izin Yang Dapat Diselesaikan	Persen	80,00	246.790.000	0,00	0	80,00	246.790.000	80,00	183.773.798	80,00	183.773.798	SANGAT TINGGI	
2.12.2.12.01.22	Program Peningkatan Kualitas Datad Sistem Informasi	Persentase Kesesuaian Regulasi PTSP Pusat dan Daerah	Persen	100,00	305.000.000	0,00	0	100,00	305.000.000	100,00	284.508.000	100,00	284.508.000	SANGAT TINGGI	

## **2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta**

Berdasarkan hasil dari evaluasi kinerja dan penilaian mandiri lainnya atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2020, maka terdapat isu-isu strategis yang dapat diamati terkait dengan manfaat dan pengaruhnya di masa yang akan datang terhadap peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi investasi PMA yang lebih menonjol dibandingkan dengan investasi PMDN;
2. Gap yang tinggi antara minat investasi dan realisasi investasi;
3. Potensi/Peluang investasi belum memiliki Feasibility Study (FS);
4. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
5. Belum adanya kebijakan insentif bagi penanam modal di Kabupaten Purwakarta;
6. Digitalisasi promosi investasi Kabupaten Purwakarta;
7. Pelayanan perizinan secara online dan terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik;
8. Minimnya keterikatan pelayanan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan;
9. Sinkronisasi regulasi perizinan antara Pusat dan Daerah.

### 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2022 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Pada tahun 2022 program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mengalami perubahan nomenklatur yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta serta dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023, yang kemudian akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Purwakarta sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2022. Berikut ini adalah tabel review terhadap rancangan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 :

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2020**  
**Kabupaten Purwakarta**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	1 Tahun Anggaran	50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	1 Tahun Anggaran	50.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan	1 Tahun Anggaran	15.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan	1 Tahun Anggaran	15.000.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas administrasi barang milik daerah dan pelaporan lainnya	1 Tahun Anggaran	10.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas administrasi barang milik daerah dan pelaporan lainnya	1 Tahun Anggaran	10.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas potensi dan kompetensi pegawai	1 Tahun Anggaran	400.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas potensi dan kompetensi pegawai	1 Tahun Anggaran	400.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas pemenuhan	1 Tahun Anggaran	600.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun Anggaran	600.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
			administrasi umum perangkat daerah								
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas pengadaan barang milik daerah	1 Tahun Anggaran	200.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas pengadaan barang milik daerah	1 Tahun Anggaran	200.000.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purwakarta	Terlaksananya kegiatan pelayanan penunjang urusan perkantoran	1 Tahun Anggaran	2.300.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purwakarta	Terlaksananya kegiatan pelayanan penunjang urusan perkantoran	1 Tahun Anggaran	2.300.000.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purwakarta	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun Anggaran	1.500.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purwakarta	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun Anggaran	1.500.000.000	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya potensi investasi penanaman modal di Kabupaten Purwakarta	1 Tahun Anggaran	350.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya potensi investasi penanaman modal di Kabupaten Purwakarta	1 Tahun Anggaran	350.000.000	
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya potensi investasi penanaman modal di Kabupaten Purwakarta	1 Tahun Anggaran	75.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya potensi investasi penanaman modal di Kabupaten Purwakarta	1 Tahun Anggaran	75.000.000	
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal	1 Tahun Anggaran	150.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal	1 Tahun Anggaran	150.000.000	
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
1	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Terpadu SatuPintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1 Tahun Anggaran	350.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Terpadu SatuPintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1 Tahun Anggaran	350.000.000	
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya realisasi penanaman modal di Kabupaten Purwakarta	1 Tahun Anggaran	400.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya realisasi penanaman modal di Kabupaten Purwakarta	1 Tahun Anggaran	400.000.000	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi yang di mutakhirkan	1 Tahun Anggaran	600.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi yang di mutakhirkan	1 Tahun Anggaran	600.000.000	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

#### **3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Penanaman Modal**

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020 – 2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan dan startegi yang akan dilakukan pada masingmasing arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Arah kebijakan pertama : peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs);
  - b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
  - c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal;
  - d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal;
  - e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal;
  - f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020 – 2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman

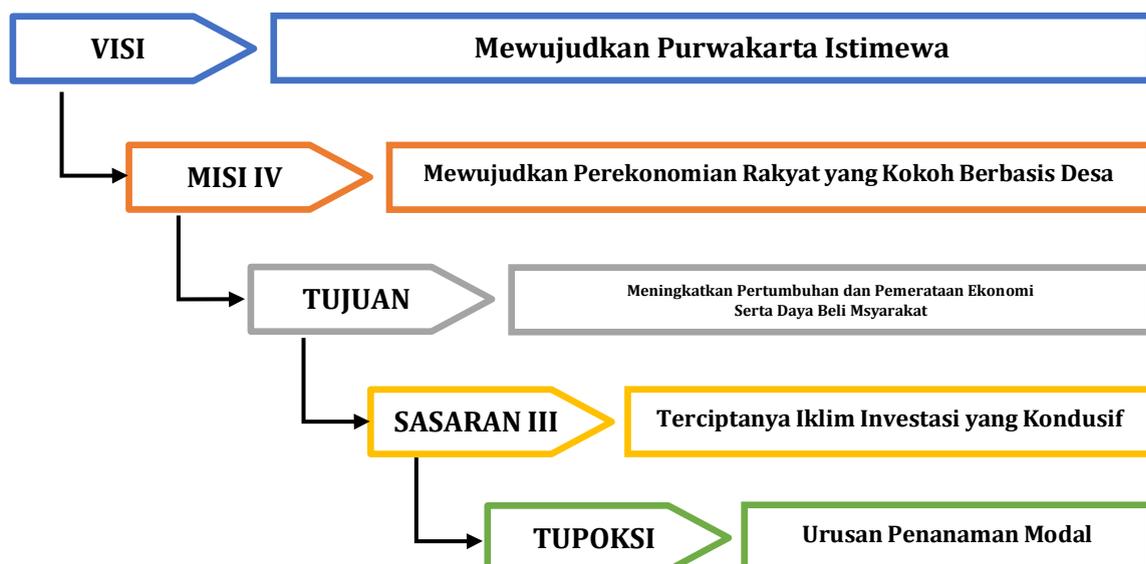
modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja;
- b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal;
- c. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
- d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar;
- e. Meningkatkan penanaman modal pada industry yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor;
- f. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar;
- g. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya alam di dalam negeri.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”**. Visi tersebut menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Visi tersebut ditunjang oleh beberapa misi, salah satu misi yang pelaksanaannya didukung oleh DPMPTSP adalah Misi Keempat yaitu Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa dengan Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana dapat dilihat dari gambaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah terpilih dengan Tugas, Pokok dan Fungsi DPMPTSP di bawah ini :



Gambar 3.1

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Tupoksi Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 pada Misi Keempat yaitu:

**Tujuan:** Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif

**Indikator Tujuan:** Laju pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut DPMPTSP menetapkan sasaran yaitu :

**Sasaran Kesatu:**

Meningkatnya pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

**Indikator:** Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN

**Sasaran Kedua:**

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal.

**Indikator:** Indeks Kepuasan Masyarakat

### 3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disamping mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang / Forum Perangkat Daerah, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
- b. Pencapaian MDGs dan IPM;
- c. Perkembangan teknologi informasi;
- d. Kebijakan Pusat dan Provinsi;

- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- f. Rencana Aksi MCP Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan komponen penunjang keberhasilan pembangunan tersebut akan dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta dan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dimana program dan kegiatan Tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut :

### **1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Indikator kinerja program : Jumlah Minat Penanaman Modal.

Kelompok sasaran program : Seluruh pelaku usaha PMA dan PMDN.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

### **2. Program Promosi Penanaman Modal**

Indikator kinerja program : Jumlah Promosi Penanaman Modal dan Diselenggarakan.

Kelompok sasaran program : Seluruh Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

### **3. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Indikator kinerja program : Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan dan Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Kelompok sasaran : Seluruh Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

### **4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Indikator kinerja program : Persentase PMA dan PMDN yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala.

Kelompok sasaran : Pelaku Usaha PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

### **5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Indikator kinerja program : Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan.

Kelompok sasaran : Seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## **6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kinerja program : Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran.

Kelompok sasaran : Seluruh Unit Kerja di Internal Perangkat Daerah.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dan dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada perubahan Tahun 2022 telah selaras dengan program prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Guna tercapainya target indikator kinerja DPMPTSP, terlampir Rencana Kerja Program dan Kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**DPMPTSP Kabupaten Purwakarta**

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				13.179.834.825				<b>16.518.837.885</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				11.786.514.725	APBD			<b>14.493.837.885</b>
<b>A</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	85.437.000	APBD	100%	<b>90,000,000</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	<b>20.010.400</b>	APBD	100%	<b>20,000,000</b>

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	<b>8.128.050</b>	APBD		100%	<b>10,000,000</b>
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	<b>57.298.550</b>	APBD		100%	<b>60,000,000</b>
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	7.440.686.255	APBD		100%	<b>8,638,837,885</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	<b>7.420.686.255</b>	APBD		100%	<b>8,618,837,885</b>

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	10.000.000	APBD		100%	10,000,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	10.000.000	APBD		100%	10,000,000
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	16.599.296	APBD		100%	30,000,000
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	-	APBD		100%	-

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	16.599.296	APBD		100%	30,000,000
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	80.000.000	APBD		100%	400.000.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	-	APBD		100%	150,000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	80.000.000	APBD		100%	150,000,000
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	-	APBD		100 %	100,000,000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	641.038.650	APBD		100%	<b>795,000,000</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	<b>50.000.000</b>	APBD		100%	<b>50,000,000</b>
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	<b>60.038.750</b>	APBD		100%	<b>60,000,000</b>
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	<b>250.000.000</b>	APBD		100%	<b>250,000,000</b>

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	<b>99.999.900</b>	APBD		100%	<b>100,000,000</b>
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	<b>6.000.000</b>	APBD		100%	<b>10,000,000</b>
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	<b>50.000.000</b>	APBD		100%	<b>100,000,000</b>
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	<b>100.000.000</b>	APBD		100%	<b>100.000.000</b>

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	25.000.000	APBD		100%	25.000.000
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	-	-		100%	100.000.000
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	255.218.450	APBD		100%	1.000.000.000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	-	APBD		100%	500.000.000
2	Pengadaan Mebel (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	152.290.950	APBD		100%	200.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	102.927.500	APBD		100%	300.000.000
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	2.462.935.074	APBD		100%	2.710.000.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	7.000.000	APBD		100%	10.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	608.391.850	APBD		100%	700.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	1.847.543.224	APBD		100%	2.000.0000.000
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	804.600.000	APBD		100%	830.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	150.000.000	APBD		100%	150.000.000
2	Pemeliharaan Mebel (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	30.000.000	APBD		100%	30.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
3	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	74.600.000	APBD		100%	100.000.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	400.000.000	APBD		100%	400.000.000
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	150.000.000	APBD		100%	150.000.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>				<b>99.989.800</b>	APBD			<b>300.000.000</b>
A	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9 Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100%	<b>49.989.900</b>	APBD		100%	<b>200.000.000</b>

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100%	49.989.900	APBD		100%	200.000.000
B	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	10	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100%	<b>49.999.900</b>	APBD		100%	100.000.000
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100%	49.999.900	APBD		100%	100.000.000
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					<b>199.950.000</b>	APBD			400.000.000
A	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab.Purwakarta	100%	<b>199.950.000</b>	APBD		100%	400.000.000
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab.Purwakarta	100%	50.985.000	APBD		100%	200.000.000
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab.Purwakarta	100%	148.965.000	APBD		100%	200.000.000
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					<b>299.986.500</b>	APBD			525.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
A	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modalyang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	12	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan;Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab.Purwakarta	100%	299.986.500	APBD		100%	525.000.000
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan;Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab.Purwakarta	100%	<b>99.993.650</b>	APBD		100%	300.000.000
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan danNon Perizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan;Nilai Pencapaian IndeksKepuasan Masyarakat	Kab.Purwakarta	100%	<b>40.000.000</b>	APBD		100%	75.000.000
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan;Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab.Purwakarta	100%	<b>109.999.600</b>	APBD		100%	100.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab.Purwakarta	100%	<b>49.993.250</b>	APBD		100%	50.000.000
V	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>393.394.000</b>	APBD			400.000.000
A	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab.Purwakarta	100%	393.394.000	APBD	100%	400.000.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab.Purwakarta	100%	<b>59.400.000</b>	DAK	100%	50.000.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab.Purwakarta	100%	<b>241.794.000</b>	DAK	100%	250.000.000
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab.Purwakarta	100%	<b>92.200.000</b>	DAK	100%	100.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					399.999.800	APBD			400.000.000
A	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab.Purwakarta	100%	399.999.800	APBD		100%	400.000.000
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab.Purwakarta	100%	399.999.800	APBD		100%	400.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Pencapaian atas Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 dalam meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN tercapai 116% dan dalam meningkatnya kualitas pelayanan perizinan tercapai 104%, namun ada beberapa elemen dalam indikator tersebut yang belum maksimal. Untuk itu perlu adanya evaluasi atas hasil capaian indikator tersebut melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dan calon investor di Kabupaten Purwakarta.

Komitmen dan dukungan dari seluruh pihak di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta guna terwujudnya sinergitas kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan di atasnya. Harapan kami semoga Renja Tahun 2022 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta,        Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



**R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM**  
NIP. 19731102 199901 1 001